

ANALISIS KESESUAIAN BENEFICIARIES PADA PROGRAM BIDIKMISI DI UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Irfan Murtadho Yusuf, Aloysius Rengga
Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : [http:// www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email fisip@undip.ac.id

Abstract

Bidikmisi scholarship program is allocated for Senior high school graduates from low-level-community who are willing to continue studying in university. However, there is an unsuitability of bidikmisi scholarship during its implementation to its proper beneficiaries. Therefore, this research aims at analyzing the suitability of bidikmisi scholarship program in Diponegoro University viewed from its beneficiaries as well as finding out the constraints of bidikmisi scholarship implementation. This study used qualitative descriptive method. The data of this research are obtained from some informants chosen by purposive technique. Moreover, the data are analyzed using triangulation method. In addition, the result of this study shows that the program suitability with the benefit has positive result which is seen from the benefit obtained by bidikmisi scholarship beneficiaries. Nevertheless, the program suitability with the implementor organization shows less optimal result since sometimes there is a delay in bidikmisi scholarship disbursement. Besides, the suitability of the targeted community with the implementor organization shows similar result, i.e. the regulated requirements have not been implemented consistently. There are some constraints of bidikmisi scholarship program found in this research, i.e. a lack in human resources managing this program and a long complicated procedure in the program administration. The researcher suggests that Diponegoro University needs to improve the quality as well as the quantity of human resources managing bidikmisi scholarship program. Moreover, Diponegoro University needs to improve supervision and responsiveness to coordinators of bidikmisi scholarship program in each department.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah dalam mewujudkan kemajuan pendidikan mengeluarkan

program bantuan beasiswa Bidikmisi, yaitu program bantuan pendidikan/beasiswa melalui Kementerian Pendidikan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

yang ditujukan bagi siswa-siswi berprestasi yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi namun kurang mampu, program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan memutus rantai kemiskinan. Agar program tersebut berhasil maka memerlukan kesesuaian *beneficiaries* pada program.

Program Bidikmisi yang telah berlangsung sejak tahun 2010 merupakan program 100 hari kerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan diteruskan hingga saat ini. Pada tahun 2014 Bidikmisi berada dibawah naungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa). Program beasiswa bidikmisi diatur dalam Permendikbud Nomor 96 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Bidikmisi, program ini ditujukan bagi calon mahasiswa tidak mampu dan memiliki potensi akademik. Program ini sejalan dengan Nawacita pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan produktivitas rakyat

dan daya saing di pasar internasional. Implementasi dari kebijakan program bidikmisi masih mengalami ketidaksesuaian dari segi penerima maupun kemampuan organisasi didalam melakukan tugas yang diisyaratkan bidikmisi. Mengutip hasil evaluasi laporan tahunan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemenristekdikti juga menunjukkan permasalahan yang sama yaitu; penyaluran biaya Bidikmisi yang terlambat, pengawasan yang kurang dalam penyaluran sehingga membuat penerima Bidikmisi kurang tepat sasaran (Laporan Tahunan Dirjen Belmawa Tahun 2015) dan kurangnya koordinasi antar Perguruan Tinggi dan Kopertis wilayah untuk pelaksanaan penetapan mahasiswa penerima dana bantuan Bidikmisi (hasil wawancara pegawai Dirjen Belmawa Tahun 2017).

Analisis Kesesuaian *Beneficiaries* dilakukan untuk melihat bagaimana kesesuaian program dengan manfaat, kesesuaian program dengan kelompok sasaran, dan kesesuaian kelompok sasaran

dengan organisasi pelaksana sehingga dapat mengetahui sejauh mana pelaksanaan program bidikmisi di Undip dan kendala dari pelaksanaan bidikmisi dan rekomendasi yang diberikan sehingga kedepan agar lebih baik.

“Analisis Kesesuaian Beneficiaries Pada Program Bidikmisi di Undip”.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Kesesuaian Beneficiaries pada pelaksanaan bidikmisi dan Kendala dalam pelaksanaan program bidikmisi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian bidikmisi di Undip dilihat dari beneficiaries dan menganalisis kendala program bidikmisi di Undip.

D. Tinjauan Pustaka

1. Implementasi Kebijakan Publik

Administrasi Publik adalah penggabungan antar teori dan praktek dengan sumber daya dan personal publik di organisir dan

dikoordinasikan agar dalam pelaksanaan kebijakan publik ini dapat lebih responsif terhadap kebutuhan publik.

Dalam kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan salah satunya adalah Implementasi Kebijakan. Implementasi Kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan dalam bentuk program – program atau melalui formulasi kebijakan *derrivat* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Untuk mencapai dari tujuan tersebut erat kaitannya dengan pengaruh-pengaruh dari isi kebijakan maupun dari lingkungan implementasi.

2. Kebijakan Bidikmisi

Bidikmisi merupakan Beasiswa yang diberikan dari Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, yang diatur dalam Permendikbud Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Bidikmisi. Bidikmisi memiliki tujuan yaitu meningkatkan akses dan kesempatan perguruan tinggi bagi

peserta didik yang tidak mampu, memberikan bantuan biaya pendidikan kepada calon/mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan tinggi, dan meningkatkan prestasi mahasiswa.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data dilakukan dengan metode analisis Miles dan Huberman yang langkahnya terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Herdiansyah, 2010: 164). Sementara validitas dan reabilitas data terdapat empat macam variasi yaitu triangulasi sumber data, triangulasi peneliti, triangulasi teori, dan triangulasi metode (Agustianova, 2015: 47:-49). Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode triangulasi sumber data, triangulasi peneliti, dan triangulasi metode.

HASIL PENELITIAN

A. Kesesuaian Beneficiaries Pada Program Bidikmisi di Undip

Kesesuaian Beneficiaries pada program bidikmisi dalam penelitian ini diteliti melalui tiga macam kesesuaian. Yakni: kesesuaian program dengan penerima manfaat, kesesuaian program dengan organisasi pelaksana, kesesuaian organisasi pelaksana dengan kelompok penerima manfaat.

Data primer didapatkan melalui wawancara dan observasi di lapangan sedangkan sekunder berupa Permendikbud Nomor 96 Tahun 2014 dan secara teknis dijabarkan melalui Pedoman Penyelenggaraan Bidikmisi Tahun 2017.

1. Kesesuaian Program dengan Penerima Manfaat Bidikmisi

Menurut Korten (1988) Kesesuaian program dengan manfaat ialah tolok ukuran keberhasilan dari sebuah program jika terdapat kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Program bidikmisi

adalah salah satu program dari pemerintah untuk mengakomodasi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan mempunyai potensi akademik yang baik untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.

Program Bidikmisi menawarkan beberapa bentuk bantuan yang ditawarkan oleh mahasiswa calon penerima bidikmisi, diantaranya pembebasan biaya daftar perguruan tinggi, pembebasan biaya penyelenggaraan pendidikan, biaya hidup mahasiswa, dan pembebasan pembinaan kegiatan bidikmisi.

Hal yang ditawarkan oleh program tersebut dideskripsikan bagaimana pelaksanaan bidikmisi di Undip dan menganalisis bagaimana kesesuaian program dengan implementasi dari program tersebut di Undip.

2. Kesesuaian Program dengan Organisasi Pelaksana

Kesesuaian yang dimaksud diatas adalah kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk memperoleh output program dengan

apa yang dilakukan oleh kelompok. Suatu kebijakan program dikatakan dapat tercapai dengan baik ketika organisasi pelaksana mampu untuk menjalankan tugas yang diisyaratkan oleh program untuk dijalankan.

Program ini memberikan tugas-tugas pokok terhadap organisasi pelaksana bidikmisi dalam melaksanakan program bidikmisi. Untuk menunjang keberhasilan program, tugas tersebut diatur didalam pedoman bantuan penyelenggaraan bantuan biaya pendidikan bidikmisi tahun 2017 yakni: Sosialisasi program ke sekolah SMA/ sederajat, pendataan calon penerima bidikmisi, penetapan

3. Kesesuaian Kelompok Manfaat dengan Organisasi Pelaksana dan

Pada tahap ini mempunyai arti bahwa suatu kebijakan program dapat tercapai dengan baik apabila organisasi pelaksana yaitu Bagian Kesejahteraan Mahasiswa Undip terdapat kesesuaian dengan syarat-syarat yang diputuskan.

Terdapat syarat-syarat yang telah diatur dalam program bidikmisi

dalam pelaksanaan kebijakan untuk memperoleh output yang akan dicapai. Syarat-syarat tersebut adalah: menerima bidikmisi berasal dari lulusan SMA/Sederajat, penerimaan bidikmisi yang lulus maksimal satu tahun sebelumnya, berstatus WNI, memiliki keterbatasan ekonomi, tidak menerima beasiswa lain bersumber dari APBD, lulus seleksi perguruan tinggi.

B. Kendala dalam Pelaksanaan Program Bidikmisi

Pelaksanaan Kebijakan Bidikmisi di Undip Program yang tidak sesuai dipengaruhi oleh beberapa variabel, diantaranya kejelasan komunikasi, Sumber daya manusia, anggaran, dan struktur birokrasi.

Komunikasi yang efektif adalah memperhatikan kejelasan isi dari informasi yang disampaikan, kejelasan komunikasi tersebut dilakukan dengan menggunakan cara sosialisasi dan pertemuan. Kedua kendala didalam Sumber daya dilihat dari kemampuan Sumber Daya Manusia, dan jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan program.

dan terakhir Kendala didalam Struktur birokrasi adalah dilihat dari struktur birokrasi dan alur prosedur dalam melaksanakan kebijakan Bidikmisi di Undip.

PEMBAHASAN

A. Kesesuaian Beneficiaries pada Program Bidikmisi di Undip

Kesesuaian Beneficiaries pada program bidikmisi dalam penelitian ini diteliti melalui tiga macam kesesuaian. Yakni: kesesuaian program dengan penerima manfaat, kesesuaian program dengan organisasi pelaksana, kesesuaian organisasi pelaksana dengan kelompok penerima manfaat.

1. Kesesuaian Program dengan Penerima Manfaat

a. Pembebasan Biaya Pendaftaran

Pencapaian output dari program untuk kelompok sasaran salah satunya adalah pembebasan biaya pendaftaran, dan dari hasil penelitian dapat dibuktikan bahwa seluruh mahasiswa bidikmisi yang mendaftar seleksi perguruan tinggi dibebaskan

dalam biaya dalam pendaftaran bidikmisi dan apabila sudah terjadi membayar pendaftaran bidikmisi melewati seleksi SBMPTN maka uang yang dibayarkan akan dikembalikan ke penerima bidikmisi. Jadi dapat disimpulkan kesesuaian tersebut menunjang dalam keberhasilan kesesuaian yang ditawarkan oleh program dengan yang dibutuhkan oleh penerima kelompok sasaran.

b. Pembebasan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Pembebasan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Organisasi Pelaksana yaitu Bagian Kesejahteraan Mahasiswa Undip sudah sesuai dengan yang ditawarkan oleh program. Hal tersebut dibuktikan bahwa penerima bidikmisi tidak membayar lagi dalam mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Bidikmisi, Menurut Korten (1988) Kesesuaian tersebut menunjang dalam keberhasilan kesesuaian yang ditawarkan oleh program dengan

yang dibutuhkan oleh penerima kelompok sasaran.

c. Biaya Pengelolaan Bidikmisi

Undip sebagai implementor tentu mendapatkan arahan dari Kemenristekdikti untuk menyukseskan program bidikmisi perlu adanya kegiatan penunjang, semisal dalam hal biaya transportasi bagi penerima bidikmisi, biaya hidup awal, biaya diseminasi/verifikasi, dan kegiatan pembinaan bagi mahasiswa bidikmisi. Untuk menunjang program bidikmisi. Biaya tersebut terdiri dari biaya transportasi, biaya hidup awal bagi calon mahasiswa baru penerima bidikmisi, biaya diseminasi dan verifikasi, dan biaya pembinaan mahasiswa bidikmisi.

Pelaksanaan biaya pengelolaan bidikmisi yang diberikan ke Undip sejauh ini sudah dijalankan dengan baik, hal tersebut dibuktikan bahwa mahasiswa telah menerima biaya transportasi dengan jumlah yang bervariasi tergantung dengan jarak asal tempat tinggal, dan mahasiswa yang melakukan verifikasi juga

memperoleh uang transportasi tergantung dari jangkauan wilayah yang disurvei, dan mahasiswa bidikmisi dibebaskan dalam kegiatan pelatihan/pembinaan yang diselenggarakan oleh program bidikmisi. Tetapi secara teknis Bagian Kesejahteraan Mahasiswa (Kesma) Undip belum mampu melaksanakan kegiatan berupa bimbingan karir atau konseling bagi mahasiswa bidikmisi sehingga belum ada pengarahan terhadap mahasiswa bidikmisi secara khusus. Hal tersebut dikarenakan profesi konseling tidak dimiliki oleh bagian Kesma Undip.

2. Kesesuaian Program dengan Organisasi Pelaksana

Kesesuaian program organisasi pelaksana adalah terdapat terdapat tugas yang harus dipenuhi oleh organisasi pelaksana untuk mencapai keberhasilan program dengan kemampuan organisasi pelaksana yang dimiliki. Pihak Kesejahteraan dan Kemahasiswaan Undip berperan penting terhadap pelaksanaan dari program bidikmisi di Undip. Dalam kebijakan Bidikmisi terdapat beberapa komponen yang harus

dipenuhi untuk menunjang keberhasilan program bidikmisi agar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran yaitu:

a. Sosialisasi informasi program ke SMA/ sederajat

Menurut KBBI Sosialisasi adalah proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dan lingkungannya. Didalam Kebijakan bidikmisi disebutkan bahwa Kemenristekdikti dan Perguruan Tinggi menjadi elemen didalam pelaksanaan program bidikmisi.

Kejelasan komunikasi menentukan akan keberhasilan implementasi sebuah kebijakan untuk disampaikan kepada orang lain. Kurangnya kejelasan memberikan para implementor untuk memberikan makna baru terhadap kebijakan, artinya bahwa berlawanan dengan maksud sebenarnya undang-undang itu (Edwards dalam Subarsono, 2005: 90)

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa

komunikasi yang dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Kemahasiswaan Undip melalui media cetak maupun *online* langsung dimengerti secara jelas oleh siswa yang hendak melanjutkan perguruan tinggi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua siswa pada saat mendaftar mengetahui secara jelas informasi mengenai syarat dari pendaftaran bidikmisi.

b. Pendataan calon mahasiswa

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui maupun dianggap. Pendataan calon mahasiswa bidikmisi dilihat dari berbagai segi, antara lain: perkembangan nilai rapor, dan keterangan tidak mampu dari calon pendaftar.

Bedasarkan data dari peneliti disimpulkan bahwa pendataan sudah sesuai prosedur yang sudah ditetapkan, dan organisasi pelaksana bekerja sesuai peraturan yang ada.

c. Penetapan calon mahasiswa penerima Bidikmisi melalui sistem bidikmisi

Menurut KBBI penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, jadi maksud dari penetapan bidikmisi adalah memutuskan mahasiswa yang berhak lolos dalam penerimaan beasiswa bidikmisi. penetapan dilakukan saat calon penerima bidikmisi sudah melakukan verifikasi ulang di Undip.

Dari hasil penelitian yang didapat bahwa penetapan yang dilakukan oleh Kesejahteraan Mahasiswa (Kesma) Undip sudah dilakukan dengan baik, hal tersebut karena Undip telah melakukan survei lapangan sesuai yang disebutkan oleh peraturan penyelenggaraan bidikmisi, namun untuk penetapan pada tahap kedua apabila terdapat sisa kuota bidikmisi pelaksana program hanya melakukan tes wawancara dan berdasarkan data administratif yang dikumpulkan sesuai persyaratan pendaftar bidikmisi untuk proses penetapan penerima bidikmisi. Akibatnya proses penetapan rawan terjadi tidak

tepat sasaran dalam penerimaan beasiswa mahasiswa bidikmisi.

d. Penetapan calon penerima bidikmisi melalui SK Pimpinan Perguruan Tinggi

Didalam pedoman penyelenggaraan bidikmisi disebutkan bahwa setiap pimpinan/rektor dari Perguruan Tinggi perlu mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Rektor sebagai syarat administratif penyaluran dana bidikmisi, karena jika tidak ada SK Rektor maka Belmawa Kemenristekdikti tidak dapat menindak lanjuti dari calon penerima bidikmisi.

Data penelitian yang diperoleh diketahui bahwa Bagian Kesma Undip telah mampu melaksanakan sesuai dengan pedoman bidikmisi, sehingga dapat disimpulkan bahwa peraturan tersebut telah sesuai dengan kemampuan organisasi pelaksana dalam melaksanakan program.

e. Penetapan dan pelaporan perubahan data bidikmisi setiap akhir semester

Penetapan dan pelaporan ini diperlukan setiap akhir semester tujuannya apabila ada perubahan maka dapat mengetahui nama siswa yang diganti hak bidikmisinya tentunya juga agar lebih mudah untuk diawasi hasil penelitian di lapangan bahwa terdapat data temuan bahwa mahasiswa lama yang sudah tidak aktif namun masih terdata di penerima bidikmisi di Universitas hal ini tentu berpengaruh pada proses penyaluran dana bidikmisi sehingga menimbulkan keterlambatan waktu dalam pencairan bagi mahasiswa pengganti tersebut. Hal tersebut masih belum sesuai dengan tugas yang diberikan dan kemampuan yang dimiliki oleh organisasi pelaksana (Korten, 1988).

f. Melaporkan data dan informasi akademik mahasiswa bidikmisi

Pelaporan data dan informasi akademik bidikmisi merupakan syarat wajib bagi mahasiswa bidikmisi untuk melaporkan perkembangan dari masa studinya. Dengan adanya pelaporan data akademik maka dapat mengetahui bagaimana keberhasilan dari tujuan

yang sudah dicapai. Tugas dari Kesejahteraan Mahasiswa (Kesma) Undip tersebut erat kaitannya dengan ketepatan waktu dalam penyaluran bidikmisi. Kesma Undip dalam melaksanakan tugasnya ditunjang oleh perlengkapan yang mencukupi. Setiap semester perguruan tinggi merekapitulasi prestasi dari setiap penerima bidikmisi melalui sistem bidikmisi.

Data yang diperoleh peneliti bahwa aspek disposisi merupakan kendala dari pelaksanaan tugas diatas, sehingga tidak jarang penyaluran bidikmisi terhambat karena kendala dalam alur disposisi yang dilakukan Kesma Undip dan pihak akademik di setiap jurusan.

g. Monitoring dan evaluasi internal

Monitoring adalah aktivitas yang ditujukan tentang untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan dengan pendekatan yang dipakai adalah melalui riset dan praktek, dan evaluasi internal adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan.

Hasil penelitian yang telah dipeoroleh bahwa proses monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik, Bagian Kesejahteraan Mahasiswa Undip belum mampu memberdayakan setiap koordinatir di setiap jurusan sehingga tugas yang dilaporkan tidak lengkap, dan proses monitoring hanya mengandalkan dari hasil nilai dari perolehan studi mahasiswa bidikmisi tersebut.

3. Kesesuaian kelompok pemanfaat denan organisasi pelaksana

Kesesuaian program organisasi pelaksana adalah terdapat terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penerima bidikmisi untuk memperoleh program dan organisasi pelaksana memiliki tanggung jawab untuk mematuhi syarat yang diputuskan oleh program bidikmisi untuk mencapai keberhasilan program. Pihak Kesejahteraan Kemahasiswaan Undip berperan penting terhadap pelaksanaan dari program bidikmisi di Undip. Dalam kebijakan Bidikmisi terdapat beberapa klasifikasi yang harus

dipenuhi untuk menunjang keberhasilan program bidikmisi.

a. Penerimaan bidikmisi yang lulus dari lulusan SMA/ sederajat

Bidikmisi hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah lulus dari pendidikan SMA/SMK/ sederajat yang hendak melanjutkan pendidikan menuju perguruan tinggi. Sekolah mengusulkan nama-nama yang akan didaftarkan dan sekolah terdaftar sebagai pemberi rekomendasi ke laman bidikmisi

Berdasarkan dari hasil wawancara yang diperoleh bahwa penerimaan mahasiswa bidikmisi sudah sesuai pedoman penyelenggaraan bidikmisi 2017 yang telah ditetapkan. Namun jumlah kuota yang dikonsentrasi bagi sekolah penerima belum secara pasti diatur oleh perundangan karena menurut data yang didapat peneliti kebanyakan penerima beasiswa bidikmisi di Undip berasal dari Jawa Tengah.

b. Penerimaan bidikmisi yang lulus maksimal satu tahun sebelumnya dari lulusan SMA/ sederajat

Syarat untuk mendapatkan beasiswa bidikmisi adalah mendaftar dengan maksimal satu tahun lulus pada angkatan sebelumnya, jadi apabila mahasiswa tidak berkesempatan pada tahun pertama dapat mendaftarkan kembali pada tahun yang kedua. Mahasiswa mendaftar melalui Kemahasiswaan atau memperoleh usulan dari dosen dan usia maksimal 21 tahun.

Hasil Penelitian yang dilakukan peneliti bahwa penerimaan mahasiswa bidikmisi sudah sesuai dengan kebijakan bidikmisi bahwa masih diberikan satu kali kesempatan apabila ingin menghendaki untuk mendaftar perguruan tinggi melalui bidikmisi.

c. Warga Negara Indonesia

Menurut UUD 1945 pasal 26 yang dimaksud Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.

Sebagai salah satu implementor kebijakan bidikmisi Kesejahteraan Kemahasiswaan Undip telah

melaksanakan tugasnya dengan baik, untuk bukti para penerima bidikmisi berasal dari WNI asli dengan menunjukkan bukti berupa fotokopi KTM/Kartu Tanda Mahasiswa, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran.

d. Memiliki keterbatasan ekonomi dan berpotensi akademik

Pendaftar beasiswa program bidikmisi memiliki beberapa syarat tertentu untuk diterima dalam kriteria beasiswa bidikmisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesma Undip telah sesuai dengan peraturan bidikmisi yang telah ditetapkan dalam pedoman penyelenggaraan bidikmisi tahun 2017. Sehingga dapat disimpulkan bahwa klasifikasi dalam penentuan mahasiswa bidikmisi tersebut sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

e. Tidak menerima beasiswa lain bersumber dari APBN

Salah satu syarat penting bagi mahasiswa penerima bidikmisi adalah menaati aturan bahwa penerima bidikmisi tidak boleh menerima beasiswa lain berasal dari anggaran negara. Dalam

pelaksanaannya masih terdapat mahasiswa menerima beasiswa selain bidikmisi yang berasal dari anggaran negara sehingga dapat disimpulkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program bidikmisi.

e. Lulus seleksi perguruan tinggi

Perguruan Tinggi khususnya Perguruan Tinggi Negeri Undip penerimaan bidikmisi berasal dari penerimaan mahasiswa dari jalur Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) karena pada dasarnya Ujian Mandiri (UM) tidak diperuntukkan bagi mahasiswa bidikmisi sesuai kebijakan bidikmisi bahwa seleksi mandiri diatur sesuai dengan keputusan masing-masing perguruan tinggi.

Kriteria lulus seleksi perguruan tinggi yang telah diatur oleh program dapat dipatuhi oleh kelompok penerima manfaat dan Organisasi Pelaksana (Korten, 1988: 241).

B. Kendala dalam pelaksanaan program bidikmisi

a. Kejelasan

Indikator kejelasan komunikasi juga merupakan elemen yang memengaruhi. Kejelasan komunikasi menentukan akan keberhasilan implementasi sebuah kebijakan untuk disampaikan kepada orang lain. Kurangnya kejelasan memberikan para implementor untuk memberikan makna baru terhadap kebijakan, artinya bahwa berlawanan dengan maksud sebenarnya undang-undang itu (Edwards dalam Subarsono, 2005: 90)

Dari hasil penelitian bahwa terdapat kendala berupa kejelasan informasi yang kurang, hal tersebut dibuktikan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai penerima beasiswa program bidikmisi tidak dicantumkan dengan jelas oleh Undip melalui *website* resminya.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah hal yang paling penting didalam suatu keberhasilan sebuah program untuk mencapai keberhasilan, dari hasil

penelitian dapat diketahui bahwa Bagian Kesejahteraan Mahasiswa Undip sudah kompeten dalam melakukan tugas bidikmisi. Namun terdapat kendala jika dilihat dari faktor ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi masih kurang memadai. Hal tersebut mengakibatkan bimbingan karir/konseling belum diadakan hingga sampai sekarang.

c. Anggaran

Sebuah kebijakan publik tidak akan berjalan efektif bila tidak terdapat anggaran pendukung. Namun dari hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran yang diberikan oleh program dinilai masih kurang.

d. Struktur Birokrasi

Didalam struktur birokrasi terdapat adanya Standar Operasional Procedure dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan hal tersebut juga berlaku dalam program bidikmisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesma Undip melaksanakan program bidikmisi berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Bidikmisi Tahun 2017, namun

pelaksanaannya alur prosedur yang panjang membuat pencairan bidikmisi di universitas menjadi lama dan berdampak tidak efisien.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesesuaian Program dengan manfaat dilihat dari bagaimana kesesuaian yang ditawarkan program dengan yang dibutuhkan kelompok pemanfaat secara keseluruhan bahwa bantuan biaya hidup yang diberikan penerima bidikmisi Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi perlu melakukan peninjauan kembali bantuan program karena bantuan yang ditawarkan masih dinilai kecil dengan kebutuhan dasar mahasiswa penerima bidikmisi.
2. Kesesuaian kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana dilihat dari syarat yang harus dipenuhi oleh penerima bidikmisi untuk memperoleh program dan organisasi pelaksana memiliki tanggung jawab untuk memenuhi syarat yang diputuskan secara keseluruhan bahwa ditemukan ketidak sesuaian dengan output

yang diinginkan, Kesma Undip belum mampu memberikan informasi yang jelas terkait sosialisasi program beasiswa bidikmisi.

3. Kesesuaian Program dengan Organisasi Pelaksana dilihat dari kemampuan organisasi pelaksana dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh program secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa masih terdapat tugas-tugas yang belum sesuai dengan yang diisyaratkan program hal tersebut dibuktikan bahwa dalam pelaporan prestasi akademik (IP) mahasiswa masih menemui kendala karena alur prosedur yang panjang.

B. Rekomendasi

1. Terkait bantuan biaya hidup dan biaya pengelolaan bidikmisi yang diberikan perlu dilakukan penyesuaian ulang terhadap besaran jumlah yang diberikan,
2. Terkait penetapan mahasiswa dalam sistem bidikmisi, bagian Kesma Undip perlu lebih selektif dalam melakukan penetapan mahasiswa bidikmisi,

3. Terkait monitoring dan evaluasi internal, bagian Kesma Undip perlu meningkatkan pengawasan dan responsivitas terhadap koordinator setiap jurusan di fakultas,
4. Terkait sumber daya perlu penambahan sumber daya manusia sesuai kompetensi yang diperlukan dalam mengurus bidikmisi,
5. Terkait struktur birokrasi perlu adanya responsifitas antara bidang akademik disetiap jurusan dan bagian Kesma Undip sehingga dalam pelaksanaan penyaluran bidikmisi tidak terlambat

DAFTAR ISI

Buku :

- Agustianova, Danu Eko. (2015). *Memahami metode penelitian kualitatif; Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Calpulis
- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Denhardt, dan Denhardt. 2007. *The New Public Service*. Amerika: Penerbit M.E. Sharpe, Inc
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*.

Jakarta: PT Elex Media Komputindo

- Herdiansyah, Hris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Perbandingan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 2015. Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Mahasiswa Tahun 2015. Jakarta: Kementerian Ristekdikti RI.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 2016. Puspawarna Pendidikan Tinggi Indonesia 2011-2015. Jakarta: Kementerian Ristekdikti RI.
- Miles, dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press
- Nugroho, Riant. 2003. *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pasolong, Harbani. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Santosa, Pandji. 2009. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sedarmayanti. 2009. *Good Governance dan Good*

Corporate Governance.
Bandung: Mandar Maju

Pedoman Penyelenggaraan Bantuan
Biaya Pendidikan Bidikmisi
Tahun 2017

_____. 2010. *Good Governance* “Kepemerintahan yang Baik” Bagian Kedua Edisi Revisi. 2012. Bandung: Mandar Maju

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Thoha, Miftah. 2002. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi, Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service)

Jurnal :

Rahmawati. 2016. Implementasi Kebijakan Beasiswa Bidikmisi Tahun 2010-2014

Pardede, Risno. 2015. Evaluasi Beasiswa Bidikmisi di Universitas Riau Tahun 2010-2014

Baskoro, Agung. 2016. Efektivitas Program Bidikmisi di Universitas Negeri Yogyakarta.

Peraturan :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri dan Pendidikan Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Bidikmisi